



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

UNIT KERJA : KANTOR KECAMATAN PENGKADAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULFAUJI

2. Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN PENGKADAN

3. NHK : 516581

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.240.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/90 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/90 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 1561 m2/23.2 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 18.500.000

1. MOTOR, HONDA HONDA NF 125 TD Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

2. MOTOR, YAMAHA XSTRIDE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 338.825

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.276.938.825

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.276.938.825

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.